

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Upaya Kemerdekaan Palestina

Fedora Esperanza; Sukri

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Email: fedoramanuhutu@gmail.com

ABSTRACT

Foreign policy is interpreted as the actualization of a country's domestic interests in the international realm. Indonesia as a sovereign country based on the Preamble to the 1945 Constitution states that one of the goals of the Indonesian state is to create world peace. The Indonesian state's efforts to create world peace were then challenged by long-standing problems related to the ongoing territorial dispute between Israel and Palestine. Reality shows that Indonesia and Palestine have had good relations for a long time. Of course, with the ongoing conflict between Israel and Palestine, it is important to pay attention to the efforts made by the Indonesian Government as a manifestation of Indonesia's efforts to create world peace as one of the goals of the Indonesian state. Indonesia's opportunity to realize this is increasingly open with Indonesia's election as a non-permanent member of the UN Security Council (UNSC). This position provides greater space for Indonesia to bring the issue of the Israeli and Palestinian conflict to international attention. This research then attempts to explain the policies taken by the Indonesian Government and the Indonesian Government's reasons for supporting Palestine through the foreign policies it takes. This research uses a neorealism approach. Researchers then see the state as the main aktor in policy formulation, but there are other supporting aktors. This research is qualitative in nature and researchers use interviews as a data collection technique.

Keywords: Foreign policy, UN Security Council, Conflict

ABSTRAK

Kebijakan luar negeri dimaknai sebagai aktualisasi kepentingan dalam negeri suatu negara di ranah internasional. Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Upaya negara Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia kemudian ditantang dengan permasalahan berkepanjangan terkait dengan perebutan wilayah yang berlangsung antara Israel dan Palestina. Realita memperlihatkan bahwa Indonesia dan palestina telah memiliki hubungan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Tentunya kemudian dengan konflik yang berlangsung antara Israel dan Palestina menjadi penting untuk mencermati upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai perwujudan dari upaya Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia sebagai salah satu tujuan bernegara Indonesia. peluang Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut semakin terbuka dnegan terpilihnya Indonesia sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Posisi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk membawa isu konflik Israel dan Palestina menjadi perhatian Internasional. Penelitian ini kemudian berupaya untuk menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan alasan Pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina melalui kebijakan luar negeri yang diambilnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan neorealisme. Peneliti kemudian melihat negara sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan, namun terdapat aktor pendukung lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Kata kunci: Kebijakan luar negeri, Dewan Keamanan PBB, Konflik

PENDAHULUAN

Politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan mengusung asas politik luar negeri bebas aktif. Asas politik luar negeri bebas aktif ini kemudian menjadi dasar bagi Indonesia untuk berinteraksi dengan negara lain baik dalam skala regional maupun global. Politik luar negeri bebas aktif ini juga dimaknai bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak terikat pada suatu aliansi atau blok tertentu, dan disaat yang bersamaan Indonesia akan berupaya untuk meningkatkan perannya di ranah internasional.

Politik luar negeri yang bebas aktif ini sejalan dengan tujuan kehidupan bernegara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia akan ikut berupaya untuk menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan ini kemudian berupaya diwujudkan pemerintah Indonesia melalui berbagai upaya diantaranya adalah dengan menghormati kedaulatan bangsa dan negara lain di dunia diantaranya adalah Palestina.

Indonesia dan Palestina telah membangun hubungan baik sejak lama. Hubungan baik ini terbangun dan Nampak dalam upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk membantu Palestina memperjuangkan haknya sebagai negara yang merdeka. Dukungan yang diberikan Indonesia kepada Palestina dapat dilihat dalam konteks solidaritas Indonesia terhadap palestina yang memiliki identitas yang sama. Kedua negara memiliki penduduk yang mayoritas beragama muslim. Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia memberikan dukungannya kepada Palestina sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Palestina diwujudkan dengan sikap dan pernyataan pejabat public yang mendukung Palestina dikancah internasional. Hal ini juga Nampak dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. pada dasarnya kebijakan luar negeri dapat dimaknai sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh suatu engara dalam membangun hubungan dengan negara lain dengan berdasarkan pada nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional dari negara tersebut. Sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa kebijakan luar negeri merupakan gambaran dari kepentingan dalam negeri yang tertuang dalam tujuan nasional suatu negara.

Kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara, termasuk Indonesia merupakan cerminan dari keinginan dan aspirasi masyarakat dalam suatu negara yang akan diperjuangkan oleh pemerintah di dunia internasional. Berdasarkan hubungan yang dibangun antara Indonesia dan Palestina terkait dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina Nampak bahwa Indonesia dalam kebijakan luar negerinya untuk mendukung Palestina tidak terlepas dari upaya Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Hubungan antara Indonesia dan Palestina sangat terkait dnegan tujuan nasional Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks melaksanakan ketertiban dunia, pendekatan melalui hubungan kemanusiaan merupakan hal yang penting. Indonesia telah menunjukkan model interaksi sosial yang saling menjaga perasaan dan harga diri dari tiap –

tiap komponen bangsa yang berbeda – beda, melalui suasana toleransi tanpa menonjolkan kepentingan kelompoknya sendiri.

Politik Luar Negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan dukungannya terhadap Palestina melalui forum internasional, salah satunya adalah di Dewan Keamanan PBB. Melalui Menteri Luar Negeri Indonesia berupaya untuk memperjuangkan isu keamanan dan upaya kemerdekaan Palestina. Selain itu dinyatakan pula bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya diberikan dalam aspek politik tetapi juga dalam aspek ekonomi, hal ini terwujud dengan Indonesia yang memberlakukan tarif nol rupiah pada berbagai produk Palestina yang masuk ke Pasar Indonesia.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina pun bahkan telah dicantumkan dalam dokumen *Aide Memoire Indonesia's Candidature for Non – Permanent Membership of the United Nations Security Council 2019 – 2020* tepatnya pada poin ke 12. Poin tersebut menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sebagai salah satu anggota penemu Organisasi Kerjasama Islam, berkomitmen untuk memfasilitasi resolusi konflik Palestina dan Israel. Indonesia juga merupakan pendukung berat moderasi dan toleransi dalam membela Islam sebagai agama yang damai. Indonesia juga berusaha untuk memperkuat ikatan solidaritas dan meningkatkan kerjasama bidang sosial – ekonomi dan teknologi antara negara – negara anggota OKI (Aide,2019).

Pada periode tahun 2019/2020 Indonesia menjadi anggota non permanen DK PBB, Indonesia dalam kenaggotannya di DK PBB memberikan penegasan bahwa Palestina haruslah menjadi perhatian utama DK PBB. Pada Februari 2019, Indonesia mendorong diselenggarakannya pertemuan DK mengenai isu Hebron. Pada Maret 2019, Menlu RI melakukan kunjungan ke Kamp Pengungsi Palestina di Amman serta menandatangani perjanjian bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina melalui UNRWA sebesar 1 juta dollar Amerika. Selanjutnya, Indonesia ketika menjadi bagian dari DK PBB selalu menegaskan bahwa “solusi dua negara” adalah satu-satunya opsi bagi proses perdamaian Palestina. Solusi dua negara sendiri adalah salah satu opsi solusi konflik Israel – Palestina yang menyerukan untuk dibuatnya “dua negara untuk dua warga”. Solusi ini ditujukan agar Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai (Misrawi, 2010).

Ketika menjadi Presiden DK PBB di bulan Mei 2019 pun, Indonesia mengeluarkan satu *presidential statement* dan diskusi informal terkait Palestina. Pada dasarnya telah terdapat berbagai penelitian yang mengkaji tentang status keanggotaan non-permanen Indonesia di DK PBB yang relevan dengan isu kemerdekaan Palestina. Beberapa diantaranya adalah jurnal yang berjudul “*Indonesia as Non – Permanent Member of United Nations Security Council : Pursuit of Peace for Rohingya and Palestine*” . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 faktor utama konstruktivis untuk membangun analisis pada penelitian ini, yakni norma, identitas dan kultur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nampak bahwa Indonesia dalam posisinya di Dewan Keamanan PBB menyuarkan resolusi konflik bagi Palestina dan Rohingya atas dasar persamaan identitas dengan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hendra Maujana yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan

Joko Widodo". Penelitian kualitatif ini merujuk pada teori *rational policy model* yang diperkenalkan Graham T Alisson untuk menganalisis proses kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 model pengambilan keputusan politik luar negeri yang dikenalkan oleh Graham T Alisson. Model pertama yakni aktor rasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan – tindakan aktor rasional, terutama pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Model kedua yakni proses organisasi. Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Terakhir yakni model politik – birokratik. Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi, *bargaining game* antar bangsa, dengan kata lain pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial, bukan intelektual.

Terdapat persamaan dan perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis upaya Indonesia di DK PBB untuk mendukung upaya kemerdekaan Palestina dengan menggunakan pendekatan neorealisme, maka dari itu aktor menjadi aspek yang sangat penting dalam penelitian ini.

Terkait dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya maka tulisan ini akan menganalisis lebih jauh tentang faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan upaya perjuangan kemerdekaan Palestina dalam kerangka perspektif neorealis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dasar penelitian ini adalah *grounded research*. Penelitian yang didasari *grounded research* merupakan penelitian yang berawal dari data yang ada. Pada saat penelitian, data pada penelitian ini menjadi sumber teori. Teori yang dihasilkan pun bertumpu pada data yang ada. Data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode *snowball sampling*, sehingga data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview dengan beberapa informan yakni pengamat Timur Tengah yakni Alto Luger, Duta Besar Palestina untuk RI, Zuhair Al – Shun, Nico Adam, staf KSIA yang pernah lama bertugas di Yordania yang menangani daerah Palestina dan Ustad KH. Muhyiddin Junaedi, salah satu petinggi PP Muhammadiyah. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan jurnal – jurnal yang terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina.

PEMBAHASAN

Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk Mendukung Upaya Kemerdekaan Palestina Pasca Terpilih sebagai Anggota Non – Permanen Dewan Keamanan PBB

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam mendukung Palestina lebih dominan pada kebijakan tidak tertulis yang ditunjukkan melalui pernyataan lisan dan sikap para pejabat publik Indonesia. Selain itu Nampak bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang diambil setelah Indonesia menjadi anggota non permanen DK PBB bukan kebijakan yang benar-benar baru dan baru diambil ketika Indonesia bergabung di Dewan Keamanan PBB. Tetapi bergabungnya Indonesia di DK PBB telah membawa implikasi positif pada upaya Indonesia

untuk membantu dan mempercepat implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang telah ada untuk mendukung Palestina. Sejak berstatus sebagai anggota non permanen DK PBB Indonesia sangat aktif dalam mengangkat isu tentang kemerdekaan Palestina.

Perhatian Indonesia terhadap isu kemerdekaan Palestina telah diwujudkan dalam berbagai kebijakan seperti bantuan yang diberikan, pernyataan sikap dan pernyataan pejabat public Indonesia sebelum Indonesia menjadi anggota non permanen DK PBB, dan ketika Indonesia menjadi anggota non permanen di DK PBB tidak Nampak adanya kebijakan tertulis baru yang secara signifikan dirancang terkait dengan upaya kemerdekaan Palestina.

Terkait dengan isu Palestina tidak banyak kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan dukungannya, bantuan yang diberikan Indonesia kepada Palestina juga tidak dapat dikirimkan secara langsung tetapi melalui Yordania. Beberapa kebijakan tertulis antara Indonesia dan Palestina di era Pemerintahan Joko Widodo yakni:

1. *MoU on The Establishment of The Joint Commission on Bilateral Cooperation Between the Republic of Indonesia and the State of Palestine* atau MoU Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral antara Republik Indonesia dan Negara Palestina.
2. *MoU on Contribution Agreement between The National Alms Agency (Baznas) and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* atau MoU Kesepakatan Kontribusi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Badan Bantuan dan Kerja untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
3. *MoU on University Scholarship Awards for Palestinian Students Between The National Alms Agency (Baznas), Forum Rektor Indonesia (The Indonesian Rectors Forum), and The Government of Indonesia and Palestine* atau MoU Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Palestina antara Baznas, Forum Rektor Indonesia, dan Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Palestina.
4. *MoU on Academic Agreement Between The University of Padjajaran Indonesia and The Embassy of the State of Palestine* atau MoU tentang Kesepakatan Akademik antara Universitas Padjajaran dan Kedutaan Besar Palestina.
5. *MoU on Contribution Agreement Between The National Alms Agency (Baznas) and Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO)* atau MoU Kesepakatan Kontribusi antara Baznas dan JHCO.
6. *MoU on The Collection of Zakat Fund Alms within The National Alms Agency (Baznas) and The Indonesian Rectors Forum* atau MoU Pengumpulan Dana Zakat di dalam Baznas dan Forum Rektor Indonesia.
7. *MoU tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0% bagi produk kurma dan minyak zaitun murni Palestina.*

Disisi lain, kebijakan tidak tertulis yang lebih mendominasi dalam politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat dalam unggahan – unggahan Kementerian Luar Negeri melalui media sosial resmi Kementrian Luar Ngeri Indonesia seperti Instagram. Melalui Instagram Nampak bahwa sikap dan tindakan yang diambil Kementerian Luar Negeri terhadap Palestina di Dewan Keamanan PBB. Saat menjadi anggota non permanen DK PBB 2019/2020, Indonesia memulai keanggotaan DK PBB dengan penegasan bahwa Palestina harus menjadi perhatian utama DK PBB. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pernah

mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan fokus Indonesia dalam memperjuangkan isu keamanan dan upaya kemerdekaan Palestina.

Pernyataan Retno dikeluarkan pada kampanye keanggotaan non – permanen Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Retno menyatakan bahwa diplomasi Indonesia harus terus lanjut memperjuangkan isu kemanusiaan dan keadilan untuk Palestina. Retno juga mengatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya dalam politik namun juga dalam ekonomi dimana Indonesia memberlakukan tarif nol rupiah pada berbagai macam produk Palestina yang masuk ke pasar Indonesia. Indonesia juga akan mempererat kerjasama dalam desalinasi air dan di bidang kesehatan.

Pada Februari 2019, Indonesia mendorong diselenggarakannya pertemuan DK mengenai isu Hebron. Pada Maret 2019, Menlu RI melakukan kunjungan ke Kamp Pengungsi Palestina di Amman serta menandatangani perjanjian bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina melalui UNRWA sebesar 1 juta dollar Amerika. Selanjutnya, Indonesia ketika menjadi bagian dari DK PBB selalu menegaskan bahwa “solusi dua negara” adalah satu-satunya opsi bagi proses perdamaian Palestina. Ketika menjadi Presiden DK PBB di bulan Mei 2019 pun, Indonesia mengeluarkan satu *presidential statement* dan diskusi informal terkait Palestina.

Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa secara spesifik apa yang dilakukan oleh Indonesia pada Palestina melalui posisinya di Dewan Keamanan PBB. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa umumnya Indonesia lebih fokus pada kebijakan luar negeri yang sifatnya tidak tertulis. Kebijakan luar negeri Indonesia lebih terlihat melalui pernyataan pejabat publik seperti Menteri Luar Negeri RI dan juga lebih terlihat pada sikap – sikap yang ditunjukkan Indonesia seperti bantuan – bantuan yang diberikan Indonesia pada Palestina. Sedangkan kebijakan – kebijakan yang tertulis dapat dilihat pada MoU – MoU yang terjalin antar Indonesia dan Palestina.

Faktor yang Mempengaruhi Perumusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Upaya Kemerdekaan Palestina

Pada dasarnya perumusan kebijakan akan melalui berbagai proses sampai suatu kebijakan akan diimplementasikan. Beberapa tahapan dalam perumusan kebijakan public diantaranya adalah tahapan agregasi kepentingan, formulasi kebijakan, agenda setting, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahapan dalam proses perumusan kebijakan yang sangat dinamis akan Nampak dalam proses formulasi kebijakan. Dalam proses ini berbagai aktor dan kepentingan yang dibawanya akan saling berinteraksi secara dinamis. Tetapi kemudian dalam proses formulasi kebijakan telah ditemukan kepentingan mana yang kemudian akan menjadi focus apda suatu kebijakan.

Terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia untuk isu kemerdekaan Palestina, beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia atas isu kemerdekaan Palestina disampaikan oleh para informan yang berasal dari berbagai institusi yang terkait dengan isu tersebut.

1. Faktor Determinan Politik Luar Negeri

Faktor determinan politik luar negeri yang digunakan dalam tulisan ini adalah empat faktor dominan yang disampaikan oleh William D. Coplin yang relevan untuk

digunakan dalam analisis faktor determinan politik luar negeri Indonesia terkait kemerdekaan Palestina adalah:

a. Determinan Konteks Internasional

Sikap yang ditunjukkan Pemerintah atas isu kemerdekaan Palestina sangat dipengaruhi oleh konteks internasional, yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat berimplikasi pada perilaku yang akan ditunjukkan oleh suatu negara. konteks internasional yang terjadi adalah konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Palestina, kondisi ini kemudian menjadi landasan sikap yang diambil oleh Indonesia dan tentu saja hal ini relevan dengan tujuan nasional.

Sikap yang diambil Indonesia dalam bentuk kebijakan luar negerinya telah berimplikasi pada pandangan dunia internasional pada Indonesia. melalui kebijakan yang diambil, Indonesia kemudian dicitrakan sebagai negara yang mulai, dengan kondisi ini kemudian posisi tawar Indonesia menjadi lebih baik dalam konteks internasional.

b. Determinan Perilaku Para Pengambil Keputusan dan Politik Dalam Negeri

Faktor determinan lainnya dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah faktor perilaku para pengambil keputusan dan politik dalam negeri. Konstelasi isu dan politik dalam negeri merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku para pengambil keputusan yang pada akhirnya akan membawa implikasi pada sikap luar negeri yang diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Kondisi di dalam negeri yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina adalah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak diantara masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman yang keliru atas Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Masyarakat Indonesia membangun asumsi bahwa konflik yang berlangsung antara Israel dan Palestina adalah konflik yang berlandaskan pada isu agama. Pemahaman yang keliru itu kemudian memunculkan rasa solidaritas identitas agama yang semakin besar sehingga masyarakat Indonesia banyak mendorong para pengambil keputusan di Indonesia untuk mendukung Palestina yang diperlihatkan dengan kebijakan luar negeri yang diambilnya.

Perilaku para pengambil keputusan membawa implikasi yang besar pada arah kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan sikap yang diambil oleh Pemerintah Indonesia terhadap Palestina dan Yamen. Hal ini memperlihatkan bahwa jika kebijakan luar negeri yang diambil oleh Pemerintah hanya didasarkan pada aspek formal (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) maka seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia untuk Palestina dan Yamen akan sama. Tetapi dalam tataran realita, terdapat perbedaan sikap yang diambil oleh pemerintah. Kondisi ini kemudian semakin menegaskan besarnya pengaruh dari perilaku pengambil keputusan dan kondisi politik dalam negeri atas kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.

Perilaku para pengambil keputusan dalam hal ini adalah sikap Kementerian Luar Negeri RI misalnya kementerian yang lebih fokus untuk memberikan bantuan kepada Palestina dibandingkan dengan Yamen. Hal lainnya adalah sikap presiden yang menunjukkan kepedulian yang lebih besar kepada Palestina karena adanya tekanan dari masyarakat.

2. *Faktor Landasan Formal*

Kepentingan nasional merupakan landasan bagi kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Dengan demikian, kepentingan nasional Indonesia menjadi faktor penting dalam menentukan sikap Indonesia terhadap Palestina. Kepentingan nasional juga dapat diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Tujuan nasional Indonesia sendiri tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Secara spesifik, tujuan yang dimaksud yang sejalan dengan sikap Indonesia terhadap Palestina yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Landasan formal dari kebijakan luar negeri Indonesia baik terhadap Palestina maupun kebijakan luar negeri secara general yakni Pembukaan UUD 1945 dan tentunya berdasarkan asas politik luar negeri yang bebas aktif. Pembukaan UUD 1945 sendiri dibentuk atas dasar sejarah berdirinya Indonesia. Bila dikaitkan dapat dilihat bahwa Indonesia tidak ingin pendudukan Israel di Palestina terjadi karena Indonesia pernah merasa hal serupa ketika sebelumnya dijajah.

3. *Aspek Historis*

Pendudukan Israel atas wilayah Palestina memperlihatkan adanya keterkaitan sejarah antara Indonesia dan Palestina sebagai negara yang sama-sama hidup dalam penjajahan. Dimasa penjajahan di Indonesia, Palestina merupakan salah satu negara yang memberikan dukungannya terhadap Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan Palestina atas Kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini diberikan bersamaan dengan pengakuan Mesir atas kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka.

4. *Persamaan Identitas*

Identitas merupakan suatu ikatan yang dapat mempengaruhi sikap yang ditunjukkan oleh aktor. Berdasarkan persamaan identitas sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam kemudian diargumentasikan menjadi faktor lain yang berpengaruh pada proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. tetapi, tentu saja faktor utama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah konstitusi sebagai landasan utama dalam kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

5. *Aktor*

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, faktor lainnya yang cukup berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan luar negeri adalah aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan untuk mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Aktor dalam hal ini kemudian dibagi atas aktor negara dan aktor non-negara. Keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan ini kemudian dianalisis dalam kerangka pendekatan neorealisme.

Dalam kerangka pemikiran neorealis dijelaskan bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional. Tetapi, negara tidak menjadi aktor tunggal, melainkan terdapat juga aktor non-negara yang dapat memberikan pengaruhnya dalam Batasan tertentu. Dalam hal ini aktor negara yang dimaksud adalah instansi atau individu yang terikat dengan negara. Instansi yang dimaksud disini yakni Kementerian Luar Negeri, sebagai instansi negara yang paling utama yang memegang peranan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Selain itu, individu yang merupakan aktor negara yang dimaksud memiliki peran paling besar ialah Presiden.

Aktor non negara adalah lembaga – lembaga ataupun individu yang tidak terikat dengan negara, atau istilah lainnya berada di lingkup privat / swasta. Aktor non negara yang dimaksud disini dapat berupa LSM, organisasi keagamaan khususnya organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya.

Perumusan kebijakan luar negeri dalam kerangka neorealisme ini memperlihatkan bahwa dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terkait upaya kemerdekaan Palestina, negara kemudian menjadi aktor utama dalam system internasional. Tetapi, selain negara, terdapat pula aktor non-negara yang berkontribusi pada upaya kemerdekaan Palestina diantaranya adalah kelompok-kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah yang memberikan dorongan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan apda upaya kemerdekaan Palestina.

PENUTUP

Indonesia dan Palestina telah lama menjalin hubungan persahabatan. Sejarah antara kedua negara ini pun begitu panjang. Dalam kesulitan yang dihadapi Palestina kini, Indonesia terus berada di sisi Palestina untuk memberi dukungan.

Dalam upaya membantu Palestina, Indonesia terus memperjuangkan bantuannya melalui kebijakan luar negerinya. Kebijakan sendiri dapat berupa kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini, dilihat bahwa lebih banyak kebijakan Indonesia yang wujudnya tidak tertulis.

Posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB memang tidak secara langsung membuat Indonesia memproduksi suatu kebijakan luar negeri baru untuk Palestina. Namun, posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB sangat membantu Indonesia dalam menggencarkan kebijakan luar negerinya yang mendukung Palestina. Dengan posisi tersebut pula, Indonesia dapat mendukung Palestina di kancah internasional dengan mendukung resolusi – resolusi PBB yang pro Palestina dan menolak resolusi – resolusi PBB yang pro Israel.

Terdapat banyak faktor yang membuat Indonesia mendukung Palestina. Jika dirangkum, berikut ialah beberapa faktor tersebut:

1. Determinan konteks internasional
2. Determinan perilaku para pengambil keputusan
3. Determinan politik dalam negeri
4. Landasan formal (Pembukaan UUD 1945 & Asas Bebas Aktif)
5. Aspek historis
6. Persamaan identitas

Perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung upaya kemerdekaan Palestina pastinya diinisiasi oleh aktor-aktor, baik yang sifatnya aktor negara maupun aktor non-negara. Posisi aktor-aktor tersebut sangat cocok dikaji melalui kacamata neorealisme. Sama seperti neorealisme, dalam perumusan kebijakan tersebut, aktor yang sifatnya negara memegang kendali utama dalam perumusan kebijakan, namun tetap saja terdapat banyak aktor non-negara yang turut andil dalam perumusan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Cetakan – XI. Jakarta : Percetakan CV Prima Grafika
- Maharani, Zhuhuruffa Dita. 2018. *Peran Malaysia dalam Penyelesaian Konflik Thailand Selatan 2005 – 2013*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Norlayanti, Nia. 2018. *Indonesia as Non – Permanent Member of United Nations Security Council : Pursuit of Peace for Rohingya and Palestine*. Proceeding of the 5th International Conference on Social and Political Sciences (IcoSaPS 2018)
- Pratama, Dekris. 2014. *Konflik Israel dan Palestina dalam Kacamata Neorealisme*. [https://www.academia.edu/88_88070/NEOREALISME Studi Kasus](https://www.academia.edu/88_88070/NEOREALISME_Studi_Kasus). Diakses pada 31 Mei 2023
- Rynmoelya. 2013. *Teori Sikap dan Sikap Politik*. <http://philosopheryn.blogspot.com/2013/01/teori-sikap-dan-sikap-politik.html>. Diakses pada 30 Mei 2023
- Saragih, Hendra Maujana. 2018. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemsyarakatan*. Vol 03 No 02.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Wahyuni, Natasia Christy. 2018. *Indonesia Palestina Sepakati Enam MoU*. [\https://www.beritasatu.com/dunia/516884/indonesiapalestina-sepakati-enam-mou. Diakses pada 17 Mei 2023
- Wangsa, Rd. Rikan Krisna. 2013. *William D. Coplin Introduction to International Politic : Model of Decision Making Process*. [\[https://www.academia.edu/11030333/William D. Coplin Introduction to International Politic Model of Decision Making Proces](https://www.academia.edu/11030333/William_D._Coplin_Introduction_to_International_Politic_Model_of_Decision_Making_Proces). Diakese pada 17 Mei 2023